

## Media Massa dan Pembentukan Pandangan Politik di Era Digital

Salwa Aidah<sup>1</sup>, Aida Restu Amalia<sup>2</sup>, Alifia Aqida<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Universitas Pamulang, Indonesia

salwaaidah17@gmail.com<sup>1</sup>, amaliaaidarestu@gmail.com<sup>2</sup>, alifiaaqida1@gmail.com<sup>3</sup>

### ABSTRACT

*The rapid development of information and communication technologies has brought about fundamental changes in the landscape of contemporary political communication. Digital mass media not only function as channels for the dissemination of political information but also serve as arenas for meaning construction, narrative production, and the negotiation of political perspectives at the societal level. This study aims to analyze the role of digital mass media in shaping public political views and to examine the patterns of interaction among media institutions, political actors, and the public within the context of digital democracy. The research employs a systematic literature review method by examining relevant and reputable scholarly sources, including indexed national and international journals, academic books, research reports, and policy articles published between 2020 and 2025. The findings indicate that digital mass media exert a significant influence on the formation of public political opinion through mechanisms of framing, agenda setting, and political narrative construction. The interactive nature of digital media enables active public participation in political discourse, contributing to the emergence of more deliberative and participatory patterns of political engagement. However, this dynamic also presents serious challenges, including opinion polarization, information bias, and the spread of misinformation, which have the potential to undermine the quality of public deliberation. This study underscores the importance of strengthening media literacy and political literacy as essential prerequisites for critical and responsible political participation. Furthermore, digital mass media are expected to fulfil their ethical and normative functions by providing accurate, balanced, and contextualized information. Theoretically, this article contributes to the development of political communication studies and digital media research, while also offering practical implications for enhancing the quality of democracy in the digital era.*

**Keywords:** Digital mass media, political views, political communication, media literacy, democracy

### ABSTRAK

*Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan fundamental dalam lanskap komunikasi politik kontemporer. Media massa digital tidak hanya berperan sebagai saluran penyebaran informasi politik, tetapi juga sebagai arena pembentukan makna, produksi narasi, dan negosiasi pandangan politik di tingkat masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran media massa digital dalam membentuk pandangan politik masyarakat serta mengkaji pola interaksi antara media, aktor politik, dan publik dalam konteks demokrasi digital. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka sistematis dengan menelaah sumber-sumber ilmiah yang relevan dan bereputasi, meliputi jurnal nasional dan internasional terindeks, buku akademik, laporan riset, serta artikel kebijakan yang dipublikasikan pada periode 2020–2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa media massa digital memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan opini politik publik melalui mekanisme ‘framing’, ‘agenda setting’, dan konstruksi narasi politik. Karakter interaktif media digital memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses diskursus politik, yang berkontribusi pada munculnya pola keterlibatan politik yang lebih deliberatif dan partisipatif. Namun demikian, dinamika ini juga menghadirkan tantangan serius berupa polarisasi opini, bias informasi, dan penyebaran misinformasi yang berpotensi melemahkan kualitas deliberasi publik. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan literasi media dan literasi politik sebagai prasyarat bagi partisipasi politik yang kritis dan bertanggung jawab. Selain itu, media massa digital diharapkan dapat menjalankan fungsi etis dan normatifnya melalui penyajian informasi yang akurat, berimbang, dan kontekstual. Secara teoretis, artikel ini berkontribusi pada pengembangan kajian komunikasi politik dan studi media digital, serta memberikan implikasi praktis bagi penguatan kualitas demokrasi di era digital.*

**Kata Kunci:** Media massa digital, pandangan politik, komunikasi politik, literasi media, demokrasi

## PENDAHULUAN

Di era digital saat ini, media massa digital telah menjadi salah satu pilar utama dalam proses pembentukan pandangan politik masyarakat (Wulandari & Ibad, 2021). Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara individu mengakses informasi, berinteraksi dengan konten politik, dan membentuk opini (Pugu et al., 2024). Penggunaan platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram tidak hanya menyediakan saluran untuk berbagi informasi, tetapi juga berperan sebagai arena diskusi politik yang dinamis (Ferreira et al., 2021). Kondisi ini menempatkan media massa digital tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai aktor strategis dalam membentuk orientasi dan pandangan politik masyarakat.

Di Indonesia, pengguna internet terbagi berdasarkan umur. Generasi muda menjadi pengguna terbanyak dan mendominasi daripada kelompok umur lain. Hal ini dapat dilihat pada data statistik pengguna internet berikut.

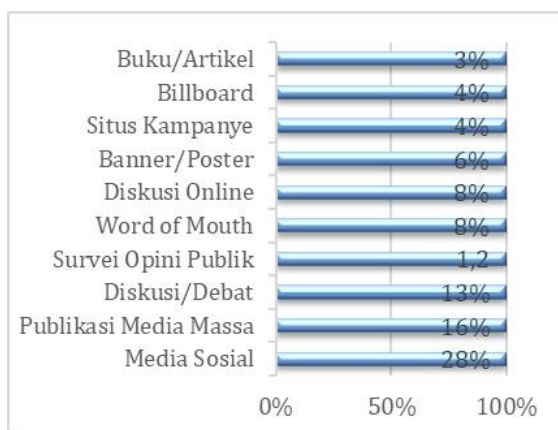
Tabel 1: Pengguna Internet di Indonesia Berdasarkan Usia

Usia	%
25 +	58,63
19-24	14,69
16-18	7,47
13-15	6,77
5-12	12,43

(Reiner, 2023)

Data di atas menunjukkan bahwa kelompok usia 25 tahun ke atas mendominasi pengakses internet di Indonesia, dengan persentase mencapai 58,63% (Reiner, 2023). Dominasi kelompok usia dewasa ini memiliki relevansi langsung dengan proses politik, karena kelompok usia ini adalah yang paling siap untuk berpartisipasi dalam proses politik, lantaran mereka sudah memiliki hak suara dan pengalaman yang lebih dalam memahami isu-isu politik (Quintelier, 2007). Dengan tingkat akses digital yang tinggi, kelompok ini berpotensi besar dipengaruhi oleh paparan informasi politik yang disajikan media massa digital.

Lebih lanjut, pada tahun 2024 lalu, masyarakat lebih tertarik mencari informasi seputar Pemilihan Umum (PEMILU) lewat media sosial. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1: Sumber Informasi Politik

Data di atas menunjukkan bahwa media sosial menjadi sumber informasi utama seputar kandidat presiden, dengan 28% responden mengandalkannya. Publikasi media massa dan diskusi panel juga berkontribusi, masing-masing sebesar 16% dan 13% (Prameswari, 2024). Temuan ini mengindikasikan bahwa media sosial memiliki posisi dominan dalam membentuk persepsi publik terhadap aktor dan isu politik, sekaligus menunjukkan adanya pergeseran pola konsumsi informasi politik masyarakat ke arah platform digital.

Hal ini menunjukkan peran penting media dalam membentuk opini publik. Sumber-sumber lain seperti survei opini publik dan percakapan di lingkungan sosial menyiratkan bahwa interaksi antara media dan

masyarakat sangat berpengaruh dalam membentuk pandangan politik, menciptakan ekosistem di mana informasi politik diperoleh dan diproses secara aktif. Dengan demikian, pengaruh media tidak hanya terletak pada penyampaian informasi, tetapi juga pada cara isu dipilih, disusun, dan didiskusikan di ruang publik digital.

Lebih lanjut, tingkat kepercayaan publik terhadap media di Indonesia juga tergolong tinggi. Penelitian dari Aliansi Jurnalis Independen menunjukkan bahwa 33,7% responden sangat percaya dan 37,4% percaya pada media. Hanya 23% yang tidak percaya, dan 5,9% yang sangat tidak percaya. Temuan ini sejalan dengan survei Kompas yang mencatat 70,2% publik percaya pada pemberitaan media massa, serta laporan Edelman Trust Barometer yang menunjukkan angka kepercayaan publik sebesar 72% (AJI Indonesia & Remotivi, 2024). Tingginya tingkat kepercayaan ini memperkuat daya pengaruh media massa digital dalam membentuk cara pandang dan sikap politik masyarakat. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar masyarakat mengandalkan media sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya.

Masyarakat Indonesia yang semakin mengandalkan platform digital untuk mendapatkan informasi terkini mengenai isu-isu politik juga membawa tantangan besar, terutama dengan meningkatnya penyebaran hoaks yang dapat merusak pemahaman politik publik (Syah *et al.*, 2025). Sebagaimana terjadi menjelang Pemilihan Umum 2024, fenomena penyebaran hoaks semakin mencolok di ruang digital. Data menunjukkan jumlah hoaks meningkat secara signifikan, dengan total 39 hoaks terdeteksi pada November 2023, menjelang dimulainya masa kampanye resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 28 November 2023. Penyebaran hoaks ini sangat mencolok di media sosial, terutama Facebook, yang mencatatkan 312 konten hoaks terkait PEMILU. Dari jumlah tersebut, 274 konten telah diputus aksesnya, sementara 38 konten masih dalam proses penanganan. Platform lain, seperti TikTok, YouTube, Twitter/X, dan SnackVideo pun mengalami hal serupa (Annur, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa media massa digital dapat berfungsi ganda, baik sebagai sarana edukasi politik maupun sebagai medium penyebaran informasi yang menyesatkan.

Interaksi yang kompleks antara media massa digital dan pandangan politik individu semakin memerlukan perhatian. Jika masyarakat tidak dilengkapi dengan literasi media yang memadai, mereka akan lebih mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji mekanisme bagaimana media massa digital memengaruhi pembentukan pandangan politik masyarakat, baik melalui penetapan agenda isu, pembingkai informasi, maupun intensitas interaksi pengguna dengan konten politik.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1) bagaimana peran media massa digital dalam membentuk pandangan politik masyarakat berdasarkan literatur yang ada; (2) melalui mekanisme apa media massa digital memengaruhi pandangan politik masyarakat; dan (3) bagaimana interaksi antara media massa digital, politik, dan masyarakat membentuk pandangan politik di era digital. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh media massa digital terhadap pembentukan pandangan politik masyarakat melalui dimensi *agenda setting*, *framing*, dan interaksi partisipatif.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Prayogi yang berjudul “*Shaping Democracy in the Digital Age: The Role of Media in Influencing Voter Behavior and Political Communication*”. Penelitian ini mengkaji peran penting media dalam membentuk komunikasi politik dan perilaku pemilih di tengah disrupsi informasi digital. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui tinjauan pustaka dan analisis konten, penelitian ini mengungkapkan bahwa media konvensional maupun digital memengaruhi preferensi pemilih melalui metode *agenda setting* dan *framing*.

Meskipun media sosial meningkatkan partisipasi politik, terutama di kalangan demografi yang lebih muda, media sosial juga memperburuk polarisasi dan disinformasi akibat bias algoritmik dan narasi yang disesuaikan dari para *buzzer* politik. Temuan ini menyoroti kebutuhan mendesak akan peningkatan literasi media untuk membantu publik menavigasi informasi secara efektif, di samping praktik media yang bertanggung jawab dan kampanye politik yang etis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi antara media, politisi, akademisi, dan masyarakat sipil sangat penting untuk menegakkan integritas jurnalistik dan memperkuat literasi digital, sehingga mendorong ekosistem demokrasi yang sehat dan memberdayakan keputusan pemilih yang terinformasi (Prayogi *et al.*, 2024). Namun demikian, fokus utama penelitian ini masih terpusat pada perilaku pemilih dan dinamika kampanye, sehingga belum secara spesifik membahas mekanisme pembentukan pandangan politik masyarakat secara umum di luar konteks elektoral.

Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Nurdiana & Lestanata yang berjudul “*Mass Media in Political Communication: Transformation from Mainstream Domination to Social Media Power*”. Penelitian ini menemukan bahwa terjadi pergeseran signifikan dalam komunikasi politik, di mana media sosial kini mengambil alih peran media massa *mainstream*. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk aktif menyebarkan pesan politik, merespon isu terkini, dan berinteraksi dengan pemimpin. Hal ini menciptakan lingkungan politik yang lebih terbuka dan partisipatif, di mana publik tidak lagi hanya sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai pencipta dan penyebar konten (Lestanata, 2024). Meskipun demikian, penelitian ini lebih menekankan pada

perubahan struktur dan aktor komunikasi politik, tanpa menguraikan secara mendalam bagaimana proses tersebut membentuk pandangan politik masyarakat melalui mekanisme komunikasi tertentu.

Lebih jauh, penelitian yang dilakukan oleh Solihat yang berjudul “*Gen Z Communication and Political Participation in Digital Media*” menunjukkan bahwa media komunikasi, terutama media sosial, memainkan peran penting dalam membentuk preferensi politik Generasi Z. Media sosial memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap keyakinan dan nilai-nilai politik mereka dibandingkan dengan media massa konvensional. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi strategi efektif untuk meningkatkan partisipasi politik dalam konteks demokrasi yang inklusif. Penelitian ini juga menekankan perlunya pendidikan politik yang lebih komprehensif dan akses yang lebih baik terhadap informasi politik untuk meningkatkan pemahaman Generasi Z tentang proses politik (Solihat, 2024). Namun, fokus penelitian ini terbatas pada kelompok usia tertentu, sehingga belum memberikan gambaran konseptual mengenai pembentukan pandangan politik masyarakat secara lintas generasi.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai peran media massa digital dalam politik cenderung terfragmentasi, baik yang berfokus pada perilaku pemilih, dominasi media sosial, maupun partisipasi politik kelompok tertentu. Belum banyak penelitian yang secara eksplisit mensintesis pengaruh media massa digital terhadap pembentukan pandangan politik masyarakat melalui mekanisme komunikasi politik yang terstruktur dan lintas konteks.

Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengisi celah konseptual tersebut, yakni dengan menganalisis pengaruh media massa digital terhadap pembentukan pandangan politik masyarakat melalui dimensi mekanisme komunikasi, seperti penetapan agenda isu, pembingkaiannya informasi, serta interaksi partisipatif antara media dan audiens. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung menempatkan media sebagai variabel tunggal atau menitikberatkan pada aktor tertentu, penelitian ini memposisikan media, politik, dan masyarakat sebagai satu kesatuan relasional dalam dinamika komunikasi politik. Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar melakukan pengulangan tema, tetapi memberikan *reframing* konseptual yang lebih sistematis dalam memahami peran media massa digital dalam membentuk pandangan politik masyarakat di era demokrasi digital yang semakin kompleks dan interaktif.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan tinjauan naratif (*narrative literature review*). Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang bersifat konseptual dan analitis, yaitu untuk memahami serta mensintesis berbagai temuan dan gagasan teoritis mengenai peran media massa digital dalam membentuk pandangan politik masyarakat. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menghasilkan temuan empiris baru melalui pengumpulan data lapangan, melainkan untuk mengintegrasikan dan menafsirkan pengetahuan yang telah ada berdasarkan literatur yang relevan.

Sumber data dalam penelitian ini berupa dokumen dan publikasi ilmiah, sehingga penelitian ini tidak memiliki populasi dan sampel dalam pengertian penelitian empiris. Unit analisis penelitian adalah dokumen tertulis, yang meliputi artikel jurnal nasional dan internasional, buku akademik, artikel berita, serta laporan riset dari lembaga terpercaya. Literatur yang dianalisis dibatasi pada publikasi yang diterbitkan dalam rentang waktu 2020–2025 guna memastikan relevansi kajian dengan konteks perkembangan media massa digital dan dinamika politik kontemporer.

Sumber literatur diperoleh melalui basis data akademik seperti Google Scholar, portal jurnal nasional terakreditasi, serta laporan resmi dari lembaga riset dan organisasi profesi yang kredibel. Artikel berita digunakan secara selektif, khususnya untuk mendukung konteks empiris terkait fenomena politik aktual, seperti PEMILU dan penyebaran hoaks di media digital.

Proses pemilihan literatur dilakukan secara bertahap dan sistematis. Tahap pertama adalah identifikasi literatur, dengan menggunakan kata kunci yang relevan, seperti media massa digital, komunikasi politik, pandangan politik masyarakat, media sosial dan politik, serta literasi media. Tahap kedua adalah penyaringan awal, yaitu menyeleksi judul dan abstrak untuk memastikan kesesuaian dengan fokus penelitian. Pada tahap ini, literatur yang tidak berkaitan langsung dengan komunikasi politik atau tidak membahas peran media digital dieliminasi.

Tahap ketiga adalah seleksi akhir berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi meliputi: (1) literatur yang membahas peran media massa digital dalam konteks politik atau demokrasi; (2) publikasi yang memiliki landasan teoretis atau analisis konseptual yang jelas; (3) sumber yang diterbitkan oleh jurnal, penerbit, atau lembaga yang kredibel; dan (4) literatur yang relevan dengan konteks masyarakat atau komunikasi politik kontemporer. Adapun kriteria eksklusi meliputi: (1) publikasi yang bersifat opini tanpa dasar akademik; (2) artikel dengan metodologi yang tidak dijelaskan secara memadai; serta (3) sumber yang tidak relevan dengan tujuan penelitian.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis tematik (*thematic analysis*) dalam kerangka tinjauan naratif. Analisis dilakukan dengan mengelompokkan temuan-temuan utama dari literatur berdasarkan tema-tema konseptual yang relevan, seperti penetapan agenda isu (*agenda setting*), pembingkai informasi (*framing*), interaksi partisipatif pengguna media, serta implikasi media digital terhadap literasi dan pandangan politik masyarakat. Setiap tema dianalisis dengan cara membandingkan dan mensintesis pandangan antarpengarang, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pola dan kecenderungan dalam kajian komunikasi politik digital.

Untuk menjaga validitas kajian, penelitian ini mengandalkan literatur dari sumber yang memiliki reputasi akademik dan kredibilitas institusional. Selain itu, penggunaan berbagai jenis sumber baik jurnal nasional maupun internasional dimaksudkan untuk memperkaya perspektif dan mengurangi dominasi sudut pandang tunggal. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama karena bergantung sepenuhnya pada data sekunder. Oleh karena itu, hasil kajian bersifat konseptual dan tidak dapat digeneralisasi sebagai temuan empiris lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Media Massa dan Pengaruhnya pada Pembentukan Pandangan Politik Masyarakat

Analisis terhadap literatur yang relevan memperlihatkan bahwa media massa memainkan peran signifikan dalam membentuk pandangan politik masyarakat Indonesia melalui mekanisme *agenda setting* dan *framing* yang bekerja secara simultan. Menurut CN & Siregar, media massa memiliki peranan sebagai saluran informasi yang menghubungkan pemerintah dengan masyarakat, serta berfungsi dalam membentuk pandangan publik (CN & Siregar, 2024). Media masih menjadi kanal utama bagi publik untuk memperoleh informasi mengenai isu-isu politik, baik melalui televisi, surat kabar, portal berita daring, maupun media sosial. Media massa, seperti televisi, radio, koran, dan platform *online*, telah mengubah partisipasi masyarakat dalam proses sosial dan politik (Piriyasanti & Phuengpha, 2024). Pola konsumsi media menunjukkan adanya pergeseran generasi, di mana kelompok usia lebih tua cenderung menjadikan televisi sebagai rujukan utama, sementara kelompok usia muda lebih banyak memanfaatkan media sosial dan platform berita digital (Klopfenstein Frei *et al.*, 2024).

Konten politik yang ditayangkan media berpengaruh pada orientasi politik publik, terutama karena media tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga membingkai informasi melalui pilihan kata, gambar, dan narasi yang digunakan (Klopfenstein Frei *et al.*, 2024). Dalam konteks ini, *framing* berfungsi sebagai mekanisme interpretatif yang membentuk cara publik memahami dan mengevaluasi realitas politik. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk mendapatkan informasi, melainkan juga sebagai alat untuk membangun narasi dan dramatisasi politik yang lebih signifikan (Utami & Wahid, 2024). Liputan yang menonjolkan aspek positif seorang tokoh atau kebijakan tertentu mampu meningkatkan penerimaan publik, sementara penekanan pada isu negatif dapat menurunkan kepercayaan (Pranata, 2025). Fakta ini memperlihatkan betapa kuat kekuatan *framing* dalam membentuk persepsi.

Selain *framing*, fungsi penetapan agenda (*agenda setting*) ditunjukkan melalui seleksi dan intensitas liputan isu tertentu. Teori penetapan agenda mengungkapkan bahwa media massa memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan isu-isu yang harus diperhatikan oleh publik, dengan mengutamakan topik-topik tertentu dan memengaruhi perspektif masyarakat terhadap isu-isu tersebut (Priscilla *et al.*, 2025). Isu-isu yang memperoleh eksposur besar akan lebih mudah dianggap penting oleh publik, sementara isu lain yang kurang diliput cenderung terabaikan. Dalam praktiknya, media yang memiliki afiliasi politik atau kepemilikan oleh elit tertentu memperlihatkan preferensi dalam menentukan isu yang diangkat. Temuan ini menunjukkan adanya relasi konseptual antara *agenda setting* media dan arah pembentukan pandangan politik masyarakat.

Fenomena polarisasi politik di Indonesia juga berkaitan dengan pola konsumsi media. Publik yang mengakses media dengan orientasi tertentu cenderung terjebak dalam gelembung informasi yang memperkuat preferensi awalnya (Aqida *et al.*, 2025). Polarisasi semakin kuat melalui media sosial yang algoritmanya menyaring informasi sesuai minat pengguna (Arifah *et al.*, 2025). Kondisi ini mengindikasikan terbentuknya *echo chamber* sebagai konsekuensi interaksi antara preferensi individu dan sistem distribusi informasi digital.

Tabel 2: Hasil Penelitian

No	Aspek Utama	Temuan
1	Media sebagai sumber informasi	Televisi dominan untuk generasi tua, media daring dan sosial bagi generasi muda
2	<i>Framing</i> pemberitaan	Menonjolkan aspek positif/negatif tokoh atau isu berpengaruh pada pandangan publik
3	<i>Agenda setting</i>	Isu yang diliput intensif dianggap penting, isu lain terabaikan
4	Polarisasi politik	Dipicu oleh perbedaan konsumsi media dan diperkuat algoritma media sosial

Sumber: Olah Data Penulis, 2025.

Kondisi ini menunjukkan bahwa media massa berfungsi ganda, yakni sebagai penyedia informasi sekaligus pembentuk konstruksi realitas politik. Peran ini semakin menentukan arah pandangan masyarakat terhadap dinamika politik Indonesia kontemporer.

### Interaksi antara Media Massa Digital dan Politik dalam Membentuk Pandangan Politik Masyarakat

Media massa digital berperan besar dalam mengubah cara orang mengakses dan mendistribusikan informasi politik. Dengan adanya platform media sosial, portal berita *online*, dan aplikasi komunikasi, masyarakat kini lebih aktif terlibat dalam isu-isu politik. Perubahan ini menunjukkan pergeseran struktur komunikasi politik dari model satu arah menuju model interaktif yang partisipatif.

Interaktivitas yang ditawarkan oleh media digital mendorong masyarakat untuk terlibat dalam diskusi, berbagi informasi, dan mobilisasi politik. Teknologi digital memperkuat hubungan antara warga dan proses politik, terutama bagi generasi muda yang lebih cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa media digital menyediakan cara baru untuk memperluas partisipasi politik di luar jalur tradisional (Pugu *et al.*, 2024).

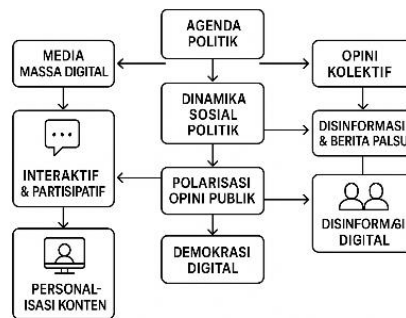
Perubahan opini publik di media digital berlangsung cepat, mengikuti isu politik yang muncul. Algoritma yang mempersonalisasi konten berperan penting dalam menciptakan ruang gema yang bisa membatasi variasi sudut pandang, sehingga berpotensi memperkuat polarisasi politik dalam masyarakat. Fenomena ini memperlihatkan hubungan langsung antara mekanisme algoritmik media digital dan pembentukan *echo chamber* politik (Lorenz-Spreen *et al.*, 2023).

Keterampilan literasi digital sangat menentukan bagaimana masyarakat memahami informasi politik yang ada. Orang dengan literasi digital yang baik cenderung lebih kritis dalam mengevaluasi sumber informasi dan memeriksa kebenaran konten yang mereka baca. Sebaliknya, mereka yang memiliki literasi digital rendah lebih rentan terhadap disinformasi, yang dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi politik (Steinfeld & Lev-on, 2024).

Disinformasi yang mengandung muatan emosional sering kali lebih mudah menarik perhatian dan menyebar di dunia digital. Pola penyebaran ini, yang didorong oleh jaringan sosial yang kuat, dapat menyebabkan polarisasi opini politik dan mengancam stabilitas demokrasi. Ini menunjukkan bahwa meskipun ruang digital menawarkan peluang besar untuk keterlibatan politik, ia juga berisiko disalahgunakan untuk tujuan manipulatif (Tornberg, 2022).

Temuan dari berbagai penelitian terdahulu di atas menunjukkan bahwa pengaruh media digital terhadap pandangan politik sangat bervariasi dan tidak bisa disamaratakan. Konsumsi berita politik di media sosial di beberapa studi menunjukkan kecenderungan meningkatnya polarisasi, tetapi di situasi lain, dampaknya tergantung pada tingkat literasi digital, jaringan sosial di dunia nyata, serta jenis konten politik yang diakses. Dengan demikian, interaksi politik dalam ruang digital harus dipahami sebagai fenomena yang dipengaruhi oleh berbagai faktor kontekstual yang saling terkait.

Berikut adalah ilustrasi dari narasi di atas:



Gambar 2: Analisis interaksi antara media massa digital, politik, dan masyarakat dalam pandangan politik

## Media Massa dan Pengaruhnya dalam Membentuk Pandangan Politik Masyarakat

Pengaruh media massa terhadap pembentukan pandangan politik di Indonesia memperlihatkan dinamika yang kompleks dan berlapis. Dalam kerangka *agenda setting* dan *framing*, media berperan sebagai aktor yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengarahkan prioritas isu dan interpretasi publik terhadap realitas politik. Posisi media yang strategis menjadikannya sebagai salah satu aktor dominan dalam proses demokratisasi, sekaligus instrumen yang dapat mengarahkan opini publik sesuai kepentingan tertentu. Pemahaman atas peran media perlu ditinjau dari cara media mengatur informasi, mengkonstruksi narasi, dan memengaruhi persepsi politik masyarakat dalam konteks sosial politik yang sedang berlangsung.

Televisi masih menjadi medium utama yang dipercaya sebagai sumber informasi politik (Knoll *et al.*, 2023). Tradisi panjang televisi sebagai kanal informasi menjangkau lapisan masyarakat yang luas, termasuk di daerah pedesaan yang akses internetnya terbatas. Kredibilitas televisi terbentuk dari cara penyajian berita yang dianggap lebih formal dan otoritatif. Televisi telah menjadi salah satu saluran informasi yang paling berpengaruh di era modern. Melalui perpaduan antara suara dan gambar, televisi dapat menyampaikan berita dengan cara yang menarik dan komprehensif, menjangkau khalayak yang luas (Kustiawan *et al.*, 2025). Namun, dalam praktiknya, televisi di Indonesia tidak sepenuhnya bebas dari kepentingan politik. Keterkaitan antara pemilik media dengan kekuatan politik tertentu telah menjadi fenomena yang sulit dipisahkan. Saat momen elektoral berlangsung, pemberitaan televisi menunjukkan preferensi yang jelas terhadap kandidat tertentu melalui liputan yang lebih intens, narasi positif, atau penyajian yang menguntungkan.

Berbeda dengan televisi, media daring berkembang pesat seiring meningkatnya penetrasi internet. Karakteristiknya yang cepat dan mudah diakses menjadikan portal berita daring sebagai sumber utama bagi masyarakat urban. Namun, orientasi ekonomi media daring membuat praktik *clickbait* menjadi hal yang lazim. Judul-judul sensasional dipakai untuk menarik klik, meskipun substansi berita seringkali tidak mendukung sensasi yang ditampilkan (Rahmatika & Prianto, 2022). Akibatnya, pembentukan pandangan politik masyarakat cenderung dipengaruhi oleh narasi emosional daripada analisis rasional. Kondisi ini diperburuk oleh praktik disinformasi yang tersebar dengan mudah di ruang digital.

Media sosial menghadirkan dimensi lain yang lebih interaktif. Publik tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga produsen opini (Suhendra & Pratiwi, 2024). Peran algoritma membuat pengguna lebih sering terpapar konten yang sesuai dengan pandangan awalnya. Fenomena ini menciptakan *echo chamber* yang memperkuat keyakinan politik tanpa memberi ruang untuk pandangan berbeda (Aqida *et al.*, 2025). Dalam konteks analitis, *echo chamber* memperkuat polarisasi karena menghambat proses pertukaran argumen yang rasional.

Fenomena *buzzer* politik menjadi bagian integral dalam pembentukan opini di era media sosial (Nainggolan *et al.*, 2024). *Buzzer* politik adalah individu atau kelompok yang secara terencana dan terkoordinasi memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan, memperkuat, atau mengarahkan pesan politik tertentu guna memengaruhi opini publik. Aktivitas *buzzer* politik umumnya dilakukan melalui produksi dan distribusi konten digital seperti narasi persuasif, tagar (*hashtag*), *meme*, serta komentar berulang pada unggahan media sosial, baik secara organik maupun dengan dukungan sistematis. Operasi *buzzer* dijalankan secara terstruktur untuk mendistribusikan narasi tertentu, memperkuat legitimasi tokoh politik, sekaligus mendeligitimasi lawan politik. *Buzzer* menggunakan teknik manipulasi wacana seperti *hashtag war*, penyebaran *meme*, hingga serangan komentar massif (Miqdad, 2024). Kehadiran *buzzer* memperlihatkan bahwa media sosial tidak hanya menjadi ruang publik, tetapi juga arena

kontestasi politik yang penuh rekayasa. Akibatnya, pandangan politik publik tidak terbentuk secara organik, melainkan diarahkan melalui strategi komunikasi politik yang sistematis.

Polarisasi politik yang terjadi di Indonesia beberapa tahun terakhir tidak dapat dilepaskan dari peran media massa (Efrianti, 2024). Kontestasi pemilihan presiden 2014 dan 2019 menjadi titik penting yang memperlihatkan bagaimana media membelah opini publik ke dalam dua kubu besar. Televisi, portal berita daring, dan media sosial sama-sama memproduksi narasi yang memperkuat posisi masing-masing kubu. Polarisasi yang terbentuk tidak hanya berlangsung di ruang maya, tetapi juga terbawa ke ruang sosial nyata, memengaruhi hubungan antartetangga, relasi keluarga, hingga dinamika organisasi masyarakat.

Selain peran dalam memperkuat polarisasi, media massa juga memengaruhi persepsi terhadap isu kebijakan publik (CN & Siregar, 2024). Pemberitaan mengenai kenaikan harga bahan pokok, konflik agraria, hingga skandal korupsi pejabat negara dipersepsikan secara berbeda tergantung media yang mengangkatnya. Media dengan orientasi tertentu dapat menyoroti isu secara intensif untuk melemahkan legitimasi pemerintah, sementara media lain menampilkan narasi tandingan yang lebih menekankan stabilitas. Situasi ini menciptakan fragmentasi pemahaman politik masyarakat, karena realitas yang dikonsumsi bergantung pada media yang diakses.

Konteks politik Indonesia saat ini menegaskan pentingnya peran media dalam mengarahkan opini publik. Proses pemilihan umum 2024 memperlihatkan betapa besar kekuatan media dalam menentukan citra kandidat (Aminulloh & Fianto, 2023). Kandidat yang mendapat sorotan positif dari media lebih mudah memperoleh simpati publik, bahkan ketika rekam jejaknya diperdebatkan. Sebaliknya, kandidat yang sering menerima pemberitaan negatif menghadapi tantangan dalam membangun legitimasi. Hal ini memperlihatkan bahwa dalam politik elektoral, eksposur media menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan.

Fungsi media sebagai *agenda setter* terlihat jelas dalam isu-isu yang memperoleh perhatian luas. Skandal besar seperti korupsi e-KTP atau kasus Bansos menjadi topik dominan karena media memberikan porsi liputan intensif (S *et al.*, 2021). Sebaliknya, isu struktural seperti ketimpangan ekonomi atau konflik agraria seringkali tidak mendapatkan perhatian proporsional. Publik akhirnya lebih memandang politik melalui kaca mata isu-isu yang disoroti media, sementara isu lain tetap berada di pinggiran wacana. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana agenda media secara langsung memengaruhi agenda publik.

Literasi media publik menjadi aspek penting dalam menentukan sejauh mana media mampu memengaruhi pandangan politik (Nurhaipah & Ramallah, 2024). Tingkat literasi yang rendah membuat masyarakat cenderung menerima informasi secara apa adanya tanpa melakukan verifikasi. Hal ini menjelaskan mengapa hoaks politik begitu mudah menyebar dan membentuk persepsi publik (Sari *et al.*, 2021). Tingginya kasus penyebaran hoaks selama periode PEMILU memperlihatkan lemahnya kemampuan masyarakat dalam menyaring informasi. Dengan demikian, penguatan literasi media menjadi prasyarat penting untuk menciptakan publik yang lebih kritis terhadap pemberitaan politik.

Namun, pengaruh media massa tidak hanya memiliki sisi negatif. Sejumlah liputan investigatif memperlihatkan kekuatan media dalam memperkuat demokrasi. Investigasi mengenai kasus korupsi besar, pelanggaran HAM, atau penyalahgunaan kewenangan memberikan kontribusi signifikan dalam membuka mata publik terhadap penyimpangan politik. Liputan tersebut menjadi dasar bagi publik untuk menuntut akuntabilitas dan mendorong transparansi. Fungsi kontrol sosial media menjadi salah satu elemen yang masih relevan dalam konteks demokrasi Indonesia.

Hal ini dapat dilihat dalam kasus Ferdy Sambo, perwira tinggi kepolisian yang terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap ajudannya, Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Ranubaya *et al.*, 2024). Kasus ini digunakan sebagai ilustrasi kontekstual untuk menunjukkan fungsi media sebagai kontrol sosial. Peristiwa tersebut menunjukkan bagaimana media massa berperan vital dalam menegakkan prinsip akuntabilitas dan menjadi pilar kontrol sosial dalam kehidupan demokrasi.

Di tengah dinamika tersebut, regulasi terhadap media menjadi isu penting yang terus diperdebatkan. Kebebasan pers dijamin dalam Undang-Undang, tetapi intervensi politik dan ekonomi seringkali mengurangi independensi media (Djulhijjah & Kencono, 2024). Diskursus mengenai revisi UU Penyiaran menimbulkan kekhawatiran bahwa kebebasan media akan tereduksi, terutama terkait larangan liputan investigatif yang dianggap sensitif. Jika kebijakan tersebut diberlakukan, kualitas pemberitaan politik berpotensi semakin melemah, dan publik kehilangan akses pada informasi kritis yang dibutuhkan untuk membangun pandangan politik rasional.

Dalam konteks demokrasi Indonesia, peran media massa tidak pernah berdiri netral. Media selalu terikat oleh struktur kepemilikan, orientasi politik, serta tekanan ekonomi (Firman & Rahmawati, 2023). Hal ini menjadikan pembentukan pandangan politik masyarakat sebagai hasil dari interaksi kompleks antara informasi yang disajikan media, kepentingan politik pemilik modal, serta tingkat literasi publik. Media berfungsi sebagai arena pertarungan wacana di mana kepentingan politik bertemu dengan kebutuhan publik akan informasi.



## Interaksi antara Media Massa Digital, Politik, dan Masyarakat dalam Membentuk Pandangan Politik

Interaksi antara media massa digital, politik, dan masyarakat dapat dievaluasi melalui berbagai aspek. Salah satunya adalah pentingnya media massa digital dalam menentukan agenda politik. Media massa digital, termasuk *platform* media sosial, situs berita *online*, dan aplikasi komunikasi digital, telah mengubah cara masyarakat mengakses, menganalisis, dan membagikan informasi politik. Saat ini, media massa digital berperan sebagai arena utama dalam komunikasi politik yang bersifat interaktif dan partisipatif. Berbeda dengan media massa konvensional yang bersifat satu arah, media digital memungkinkan masyarakat untuk tidak hanya menerima informasi, tetapi juga berkontribusi dalam diskursus politik melalui komentar, berbagi konten, dan pembentukan komunitas virtual. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Kurniawan *et al.*, (2024) yang mengatakan bahwa interaktivitas media digital meningkatkan partisipasi politik masyarakat, terutama dalam hal diskusi dan mobilisasi politik secara *online*.

Interaksi antara media massa digital dan politik tidak hanya berdampak pada individu secara pribadi, tetapi juga membentuk opini kolektif serta dinamika sosial politik yang lebih luas. Media digital memungkinkan pembentukan opini publik yang lebih cepat dan responsif terhadap peristiwa politik yang sedang berlangsung. Namun, personalisasi konten yang dihasilkan oleh algoritma platform digital berisiko menyebabkan polarisasi dan fragmentasi opini publik (Javed & Javed, 2023). Fenomena ruang gema ini menjadi tantangan bagi demokrasi digital karena membatasi paparan terhadap berbagai sudut pandang dan memperkuat bias konfirmasi. Oleh sebab itu, literasi media digital sangat penting untuk mempersiapkan masyarakat agar dapat mengkritisi dan menilai informasi dengan objektif.

Kusumawardani *et al.*, (2025) menjelaskan bahwa meskipun media sosial dapat menciptakan ruang untuk diskusi politik, potensi perubahan sudut pandang terbatas pada individu yang berdiskusi dengan perspektif berbeda dan memiliki kepercayaan pada sumber yang dapat dipercaya. Temuan ini menambah wawasan dalam literatur mengenai Gen Z dan partisipasi politik di Indonesia, yang mencatat bahwa Gen Z tetap kritis terhadap kebenaran berita dan sering memeriksa kredibilitas informasi.

Peran disinformasi dan berita palsu (*fake news*) perlu mendapatkan perhatian khusus karena dapat merusak kualitas pembentukan pandangan politik. Disinformasi, yang dirancang untuk membingungkan, menimbulkan ketakutan, atau mengkambinghitamkan pihak tertentu, dengan mudah menyebar di ekosistem media digital yang mengutamakan keterlibatan. Penelitian menunjukkan bahwa jaringan sosial yang padat dan pola pembagian informasi yang dipengaruhi oleh emosi dapat mempercepat penyebaran disinformasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan polarisasi opini publik dan mengurangi kepercayaan terhadap institusi (Vasist *et al.*, 2024).

Secara empiris, penelitian tentang dampak media digital terhadap pandangan politik memberikan hasil yang beragam dan sangat bergantung kepada konteks. Beberapa studi menemukan hubungan positif antara penggunaan media sosial untuk berita dan tingkat polarisasi sikap—pengguna yang sering mengakses berita politik melalui media sosial cenderung memiliki sikap yang lebih terpolarisasi dibandingkan mereka yang mendapatkan berita dari sumber tradisional (Chan & Yi, 2024). Namun, hasil lain menunjukkan bahwa efeknya bervariasi: hal ini tergantung pada faktor seperti tingkat literasi media pengguna, jaringan sosial *offline*, dan jenis konten (misalnya, apakah kontennya bersifat partisan atau netral).

## KESIMPULAN

Media massa digital memiliki dampak besar dalam membentuk pandangan politik masyarakat Indonesia. Berdasarkan hasil analisis dan sintesis atas literatur penelitian yang tersedia dapat disimpulkan bahwa pengaruh tersebut tidak bersifat netral, melainkan bekerja melalui mekanisme komunikasi politik tertentu, seperti pembingkaihan isu (*framing*), *agenda setting*, dan pemilihan isu. Perubahan dalam cara orang mengonsumsi media menunjukkan perbedaan antargenerasi; kelompok muda lebih banyak menggunakan media sosial dan portal berita *online*, sementara kelompok tua masih lebih mengandalkan televisi. Temuan ini menegaskan bahwa ruang digital telah menjadi arena utama komunikasi politik yang bersifat interaktif dan partisipatif, sehingga berpengaruh langsung terhadap cara masyarakat menilai isu dan kandidat politik.

Lebih lanjut, interaksi antara media digital, politik, dan masyarakat juga memperlihatkan kompleksitas yang tidak sepenuhnya positif. Media digital membuka peluang bagi perluasan partisipasi politik, namun pada saat yang sama juga menghadirkan risiko struktural, seperti polarisasi politik, pembentukan *echo chamber*, serta penyebaran disinformasi yang berpotensi menurunkan kualitas deliberasi demokratis. Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa literasi digital masyarakat merupakan variabel kunci yang menentukan apakah pengaruh media digital bersifat konstruktif atau justru kontraproduktif. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa media massa digital berperan ganda sebagai instrumen demokratisasi sekaligus ruang yang rawan manipulasi politik.

Secara teoretis, temuan penelitian ini memperkuat argumentasi dalam kajian komunikasi politik bahwa pengaruh media tidak dapat dipahami secara linier, melainkan harus dilihat sebagai relasi dinamis antara struktur media, aktor politik, dan kapasitas audiens. Dengan memfokuskan analisis pada mekanisme *agenda setting*, *framing*, dan interaksi partisipatif, penelitian ini menjawab celah penelitian sebelumnya yang cenderung terfragmentasi pada perilaku pemilih, kelompok demografis tertentu, atau dominasi platform media semata, tanpa mensintesis proses pembentukan pandangan politik masyarakat secara menyeluruh.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama karena sepenuhnya bergantung pada data sekunder berupa literatur dan tidak melibatkan data empiris lapangan. Oleh karena itu, hasil kajian ini tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi sebagai temuan empiris, melainkan sebagai kerangka konseptual dan analitis. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengombinasikan pendekatan studi pustaka dengan metode empiris, seperti survei, wawancara mendalam, atau analisis konten media digital, guna menguji secara langsung bagaimana media bekerja dalam konteks sosial dan politik tertentu.

Berdasarkan dinamika tersebut, diperlukan kolaborasi multipihak untuk menciptakan ekosistem media digital yang sehat dan mendukung demokrasi. Pemerintah, media, akademisi, dan masyarakat sipil perlu bekerja sama dalam meningkatkan literasi digital agar masyarakat mampu mengevaluasi informasi secara kritis. Media juga diharapkan konsisten mematuhi etika jurnalistik dan menjaga independensinya sebagai prasyarat utama kepercayaan publik. Dengan penguatan literasi, etika media, dan partisipasi publik yang reflektif, media massa digital berpotensi dimaksimalkan sebagai sarana pembentukan pandangan politik yang rasional, inklusif, dan berorientasi pada penguatan kualitas demokrasi.

## REFERENSI

- AJI Indonesia, & Remotivi. (2024). *Studi tentang tingkat kepercayaan publik terhadap media di Indonesia*. Aliansi Jurnalis Independen Indonesia.
- Aminulloh, A., & Fianto, L. (2023). Wacana dan citra politik kandidat presiden 2024 di media sosial. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(3), 425–436. <https://doi.org/10.33366/jisip.v12i3.2837>
- Annur, C. M. (2023). *Hoaks di media sosial meningkat jelang kampanye Pemilu 2024*. Databoks.
- Aqida, A., Aidah, S., & Amalia, A. R. (2025). Mengurai fenomena echo chamber: Implikasi untuk partisipasi politik di kalangan generasi muda. *JIKOM: Jurnal Inovasi Komunikasi*, 3(April), 26–40.
- Arifah, Rahmadini, R., & Sumanti. (2025). Pengaruh algoritma media sosial terhadap pola konsumsi informasi jurnalis di Bangka Belitung dalam perspektif etika jurnalistik. *Jurnal Komputer, Informasi dan Teknologi*, 5(1), 8. <https://doi.org/10.53697/jkomitek.v5i1.2527>
- Chan, M., & Yi, J. (2024). Social media use and political engagement in polarized times: Examining the contextual roles of issue and affective polarization in developed democracies. *Political Communication*, 41(5), 743–762. <https://doi.org/10.1080/10584609.2024.2325423>
- CN, M. M., & Siregar, M. (2024). Peran media massa dalam kebijakan publik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(2), 133–140. <https://doi.org/10.30742/juispol.v4i2.4159>
- Djulhijjah, A. S., & Kencono, P. S. (2024). Kebebasan pers dalam penyampaian berita menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(1), 18. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3047>
- Efianti, Y. (2024). Polarisasi politik Indonesia tahun 2024 dalam pemberitaan media online. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial*, 2025(1), 74–91.
- Ferreira, C. H. G., Murai, F., Silva, A. P. C., Almeida, J. M., Trevisan, M., Vassio, L., Mellia, M., & Drago, I. (2021). On the dynamics of political discussions on Instagram: A network perspective. *Online Social Networks and Media*. <https://doi.org/10.1016/j.osnem.2021.100155>
- Firman, & Rahmawati, R. (2023). Kepemilikan media dan proses demokrasi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 20(1), 35–46. <https://doi.org/10.14203/jpp.v20i1.1446>
- Javed, U., & Javed, U. (2023). The influence of social media algorithms on political polarization and public opinion. *Online Media and Society*, 4(2), 44–52. <https://doi.org/10.71016/oms/2ffw9391>
- Klopfenstein Frei, N., Wyss, V., Gnach, A., & Weber, W. (2024). “It’s a matter of age”: Four dimensions of youths’ news consumption. *Journalism*, 25(1), 100–121. <https://doi.org/10.1177/14648849221123385>
- Knoll, B., Pitlik, H., & Rode, M. (2023). TV consumption patterns and the impact of media freedom on political trust and satisfaction with the government. *Social Indicators Research*, 169(1–2), 323–340. <https://doi.org/10.1007/s11205-023-03160-3>
- Kurniawan, W., Arham, M., & Muluk, H. (2024). Social media’s influence on political participation: Insights from a systematic review and meta-analysis in Indonesian psychology. *Jurnal Psikologi*, 51(3), 236. <https://doi.org/10.22146/jpsi.101469>

- Kustiawan, W., Madani, A. L., Zahra, A. L., Anggaini, R. T., & Fadila, F. (2025). Teknik penyajian berita cetak, radio, televisi, dan media online. *Transformasi Pendidikan Modern*, 6(1), 414–429.
- Kusumawardani, V., Ayu, D., Agustin, C., & Permatasari, S. S. (2025). Social media and political preferences among Generation Z in the 2024 Indonesian general election. *Mediakita*, 9(2), 246–269. <https://doi.org/10.30762/mediakita.v9i2.2762>
- Lestanata, Y. (2024). Mass media in political communication: Transformation from mainstream domination to social media power. *Citizen and Government Review*, 1(1), 1–10.
- Lorenz-Spreen, P., Oswald, L., Lewandowsky, S., & Hertwig, R. (2023). A systematic review of worldwide causal and correlational evidence on digital media and democracy. *Nature Human Behaviour*, 7(1), 74–101. <https://doi.org/10.1038/s41562-022-01460-1>
- Miqdad, M. (2024). Literature review: Buzzer politik dan pengembangan opini di media sosial di Indonesia. *Neorespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 689–698. <https://doi.org/10.52423/neores.v5i2.231>
- Nainggolan, M., Piliang, A., Silalahi, D., Ulandari, R. J., Kevin, S., Girsang, A., & Silitonga, S. M. (2024). Pengaruh buzzer di media sosial terhadap pembentukan opini publik dalam Pilpres 2024. *Journal on Education*, 7(1), 550–559.
- Nurhaipah, T., & Ramallah, Z. (2024). Literasi media dalam menangkal informasi hoaks jelang kontestasi politik 2024. *Indonesian Journal of Digital Public Relations*, 2(2), 100. <https://doi.org/10.25124/ijdp.v2i2.6834>
- Piriyasanti, S., & Phuengpha, N. (2024). Mass media in social and political participation. *Procedia of Social Sciences and Humanities: International Conference on Emerging New Media and Social Science*, 672(C), 822–828.
- Prameswari, L. B. (2024). *Populix: 28 persen Gen Z cari informasi kandidat pilpres di media sosial*. Antara News.
- Pranata, S. (2025). Dampak pemberitaan media massa pada kepercayaan publik terhadap pemerintah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(1), 10357–10361.
- Prayogi, A., Nasrullah, R., Prasetya, D., Marina, R., & others. (2024). Shaping democracy in the digital age: The role of media in influencing voter behavior and political communication. *Jurnal Media dan Komunikasi*, 2(1).
- Priscilla, M., Afdhalu, M., Yulia, D., Amrullah, M. H., Atmanegara, X., & Apriia, F. Z. (2025). Agenda-setting theory in mass communication: The influence of media on issue prioritization in society. *Journal of Media and Digital Society on SDGs*, 1(1), 1–11.
- Pugu, M. R., Triolita, N., & Yusuf, M. (2024). New media and the changing landscape of political communication. *International Journal of Society Reviews (Injoser)*, 2(6), 1591–1605.
- Quintelier, E. (2007). Differences in political participation between young and old people. *Contemporary Politics*, 13(2), 165–180. <https://doi.org/10.1080/13569770701562658>
- Rahmatika, N., & Prianto, G. (2022). Pengaruh berita clickbait terhadap kepercayaan pada media di era attention economy. *Avant Garde*, 10(2), 190. <https://doi.org/10.36080/ag.v10i2.1947>
- Ranubaya, F. A., Siddarta, R., & Endi, Y. (2024). Kasus pembunuhan Brigadir J oleh Ferdi Sambo (dalam tinjauan norma moral objektif dan subjektif). *Jurnal Gloria Justitia*, 4(1), 19–39. <https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v4i1.5430>
- Riener, P. (2023). *Data terbaru, inilah profil usia pengguna internet Indonesia*. Goodstats.
- S. I. B. H., Kurniawan, E. P., & Irwansyah. (2021). Agenda setting dalam isu-isu kontemporer di seluruh dunia. *Jurnal Teknologi dan Informasi Bisnis*, 3(1), 105–119. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v3i1.188>
- Sari, E. N., Hermayanti, A., Rachman, N. D., & Faizi, F. (2021). Peran literasi dalam menangkal hoaks di masa pandemi. *Madani: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 13(3), 225–241.
- Solihat, M. (2024). Gen Z communication and political participation in digital media. In *Proceedings* (pp. xx–xx). Atlantis Press. [https://doi.org/10.2991/978-2-38476-269-9\\_17](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-269-9_17)
- Steinfeld, N., & Lev-On, A. (2024). Exposure to diverse political views in contemporary media environments. *Frontiers in Communication*, 9, Article 1384706. <https://doi.org/10.3389/fcomm.2024.1384706>
- Suhendra, & Pratiwi, F. S. (2024). Peran komunikasi digital dalam pembentukan opini publik: Studi kasus media sosial. In *Prosiding Resiliensi Indonesia dalam Pusaran Disrupsi Global* (pp. 293–315). <https://doi.org/10.30589/proceedings.2024.1059>
- Syah, R. F., Ekawati, E., Azanda, S. H., Syafarani, T. R., Ayunda, W. A., Zulkifli, M. Y., Rahma, N. M., & Kusumawardani, A. (2025). Hoax and election: The role of social media and challenges for Indonesian government policy. *Studies in Media and Communication*, 13(2), 294–305. <https://doi.org/10.11114/smc.v13i2.7486>
- Tornberg, P. (2022). How digital media drive affective polarization through partisan sorting. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 119(42), Article e2207159119. <https://doi.org/10.1073/pnas.2207159119>

- Utami, S., & Wahid, U. (2024). Influence of narrative and dramatized political content on 2024 regional election participation. *Communicare: Journal of Communication Studies*, 11(2), 177–193. <https://doi.org/10.37535/101011220245>
- Vasist, P. N., Chatterjee, D., & Krishnan, S. (2024). The polarizing impact of political disinformation and hate speech: A cross-country configural narrative. *Information Systems Frontiers*, 26(2), 663–688. <https://doi.org/10.1007/s10796-023-10390-w>
- Wulandari, E. R., & Ibad, M. N. (2021). Digital strategy of political communication media on social media. *Wasilatuna: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 4(1), 61–74. <https://doi.org/10.38073/wasilatuna.v4i1.555>